

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Human Capital*

2.1.1 Definisi *Human Capital*

Teori *human capital* adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya. Menurut Todaro (2015; 365-366) menyatakan bahwa konsep dari sebuah *Human Capital* dapat dilihat melalui seseorang yang melakukan Investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Investasi dalam *Human Capital* berupa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, Kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktifitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

Pengukuran indikator kesehatan dalam human capital dilakukan dengan menggunakan nilai angka harapan hidup (AHH). Nilai AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (Mantra, 2000). Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang maka semakin berkualitas indikator kesehatannya. Selain AHH, banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur indikator kesehatan seperti kematian bayi dan kematian ibu hamil. Hal ini bergantung dari tujuan penelitian yang diharapkan. Pengukuran indikator

pendidikan dilakukan dengan menggabungkan dua komponen, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Komponen melek huruf dirasa terlalu sederhana untuk mengukur tingkat pendidikan karena pendidikan semakin mudah diakses oleh banyak orang. Kedua komponen tersebut merupakan ukuran yang tepat dalam menentukan kualitas pendidikan seseorang. Rata-rata lama sekolah dapat secara jelas menggambarkan kualitas pendidikan seseorang seperti lulusan SD dengan lulusan Doktor akan memiliki perbedaan kemampuan yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas.

2.1.2 Komponen Pendekatan *Human Capital*

Menurut Andrew Mayo (2000) dalam Ongkodihardjo (2008:41) bahwa: “*Human Capital* memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan human capital perusahaan yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah perusahaan. Kelima komponen *Human Capital* tersebut antara lain:

1. *Individual Capability* (Kecakapan Individu) terbagi menjadi dua bagian:
 - a) Kecakapan Nyata (*actual ability*) yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar (*achievement* atau prestasi), yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang.
 - b) Kecakapan Potensial (*potencial ability*) merupakan aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari factor keturunan. Kecakapan potensial ini terbagi menjadi dua bagian, yakni

kecakapan dasar umum (kecerdasan) dan kecakapan dasar khusus (bakat dan attitudes).

2. *Individual Motivation* (Motivasi Individu), yakni terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Sikap mental karyawan yang positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal.
3. *The Organization Climate* (Budaya Organisasi) adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.
4. *Workgroup Effectiveness* (Efektivitas Tim Kerja) didasarkan pada dua hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaannya serta komitmen mereka terhadap perusahaan. Hasil produksi berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim yaitu konteks organisasional, struktur, strategi, lingkungan budaya, dan penghargaan.
5. *Leadership* (Kepemimpinan) adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia

2.2.1 Definisi Pembangunan Manusia

Badan pusat statistik (2020) Mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Ada tiga indikator untuk mengukur IPM yaitu: lama hidup yang dilihat dari sisi angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang dilihat dari sisi rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan yang terakhir standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang telah dikembangkan oleh *United Nation for Development Program* (UNDP) pada tahun 1990. Konsep pembangunan manusia biasanya hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya. UNDP menyatakan sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia, yaitu antara lain:

- a. Pembangunan manusia harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan tersebut untuk memperbesar pilihan – pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya – upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

Menurut Mudrajad (2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk melihat bagaimana penduduk di suatu negara atau wilayah memiliki kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. manfaat IPM untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah.

Menurut Todaro (2016) manfaat IPM yaitu untuk menunjukkan bahwa negara dapat berkinerja lebih sekalipun pendapatan suatu negara tersebut rendah. Sebaliknya ketika pendapatan suatu negara tersebut tinggi belum tentu pembangunan manusianya juga tinggi.

2.2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga komponen yaitu kelangsungan hidup, pendidikan dan daya beli (Mudrajad, 2016). nilai IPM berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendekati angka 1 maka semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau wilayah dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas begitu juga sebaliknya apabila Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendekati angka 0 maka semakin rendah nilai IPM suatu negara atau wilayah dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin tidak berkualitas. UNDP mengelompokkan indeks pembangunan manusia kedalam empat kategori, yaitu:

- a. *Very High HDI* : ketika nilai IPM ≥ 0.800
- b. *High HDI* : ketika nilai IPM 0.700 - 0.800

- c. *Medium HDI* : ketika nilai IPM 0.550 – 0.700
- d. *Low HDI* : ketika nilai IPM ≤ 0.550

Untuk menghitung IPM secara detail dapat dilihat dari tabel – tabel batas maksimum dan minimum komponen IPM sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM

No	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3	Rata-rata lama sekolah	15	0	Standar UNDP
4	Daya beli	732.720	300.000	Standar UNDP yang dilihat menggunakan PDB riil disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

2.3 Investasi

2.3.1 Definisi Investasi

Investasi menurut Sukirno (2006) merupakan pengeluaran dalam bentuk barang modal dan peralatan produksi, pengeluaran barang dan peralatan tersebut dilakukan untuk mengganti dan menambah barang – barang modal dalam perekonomian yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa di masa depan. Menurut Momongan *et al* (2015), investasi merupakan menempatkan dana untuk memperoleh keuntungan tertentu atas dana yang dikeluarkan. Investasi difokuskan

pada penempatan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Mankiw (2008) Investasi merupakan komponen PDB maupun PDRB yang mengaitkan masa sekarang dan masa depan. Dengan demikian investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang – barang modal dan perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

2.3.2 Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Investasi pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya, investasi pemerintah tidak memperhitungkan keuntungan yang didapatkan karena investasi pemerintah berfokus pada pemanfaatan untuk dapat digunakan masyarakat.
- b. Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penanaman modal dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Sedangkan Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Investasi

Tujuan dari investasi adalah mendapatkan keuntungan baik keuntungan dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Dalam konteks perekonomian, motif seseorang melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kehidupan yang lebih layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk mencapai kehidupan layak tersebut di masa yang akan datang.

- b. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi merupakan sebuah cara yang efektif dalam menekan inflasi, karena faktor inflasi tidak pernah dapat dihindari dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan hanyalah meminimalkan risiko dari akibat yang ditimbulkan oleh inflasi ini.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

Manfaat dari adanya investasi menurut Noor (2015) antara lain:

- a. Pada masyarakat: semua bentuk investasi sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena investasi menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pasar, dan lain lain), investasi di bidang kesehatan dan masih banyak lagi.
- b. Pada kelompok pribadi atau rumah tangga: investasi yang bermanfaat pada kelompok pribadi yaitu di bidang olahraga, sedangkan investasi yang bermanfaat untuk rumah tangga seperti investasi usaha, mendapatkan penghasilan, investasi untuk memiliki tempat tinggal.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Parwata *et al* (2016) laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan

demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang datang. Dalam konteks ekonomi, pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Tujuan dari peningkatan pembangunan ekonomi yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi – tingginya, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran dan lain sebagainya.

Menurut Kuncoro (2003) pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, dan kota. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan ekonomi dan menandakan bahwa daerah tersebut mengalami pertumbuhan dalam perekonomiannya.

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu dari atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai acuan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan

struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Menurut Dio (2014) dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan metode langsung dapat dilakukan dengan tiga pendekatan antara lain:

1. Pendekatan produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi merupakan penjumlahan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit produksi suatu daerah / regional dalam suatu periode tertentu. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi bruto dari barang dan jasa dikurangi seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto di suatu daerah / region dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah bruto adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran merupakan penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan

ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di suatu daerah / region dalam jangka waktu tertentu.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan metode tidak langsung dapat dilakukan dengan metode alokasi. Perhitungan dengan cara metode alokasi dilakukan dengan cara mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi ataupun PDRB provinsi menjadi PDRB kabupaten atau kota dengan menggunakan berbagai indikator produksi dan indikator lainnya yang sesuai dengan metode alokasi. Indikator – indikator tersebut yaitu nilai produksi, jumlah produksi, tenaga kerja, penduduk, dan indikator lainnya yang sesuai dengan daerah yang ditetapkan.

2.5 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

2.5.1 Definisi Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menurut Badan Pusat Statistik (2020) merupakan suatu satuan angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu Kabupaten/Kota atau Provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata – rata nasional. Tingkat kemahalan konstruksi merupakan cerminan dari suatu konstruksi, yang artinya biaya yang dibutuhkan dalam membangun sebuah unit bangunan per satuan ukuran luas Kabupaten/Kota atau Provinsi. Pengertian konstruksi sendiri merupakan kegiatan yang menghasilkan bangunan yang menyatu dengan lahan yang dijadikan media pondasi. Konstruksi dapat berupa bangunan gedung, jalan, jembatan, terowongan dan lain sebagainya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran dan perbaikan bangunan.

Indeks Kemahalan konstruksi (IKK) memiliki hubungan yang negatif terhadap pembangunan manusia yang artinya semakin menurun angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) maka semakin meningkat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) begitu juga sebaliknya ketika angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) semakin meningkat maka angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin menurun. Menurut Hakim A (2017) indeks kemahalan konstruksi digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, yang dimana semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Indeks kemahalan konstruksi yang tinggi menggambarkan bahwa buruknya infrastruktur daerah tersebut. Hal ini terjadi karena aksesibilitas daerah tersebut sulit dan mobilitas menjadi rendah sehingga berdampak pada perekonomian dan menghambat pembangunan manusia.

2.5.2 Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi

Menurut Badan Pusat Statistik dalam perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dilakukan melalui beberapa tahapan:

Tahapan pertama adalah perhitungan nilai komponen konstruksi masing – masing sistem dari suatu bangunan setiap kabupaten/kota. Untuk menghitung nilai komponen tersebut harus dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k q_k$$

Keterangan:

NK_j = Nilai Komponen ke – j.

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k.

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k.

n = Jumlah Material/upah/sewa dalam komponen ke- j.

Tahap kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

Keterangan:

NK_j = Nilai komponen ke-j.

C_i = dummy kabupaten/kota ke-i.

P_j = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem bangunan.

α_i dan β_j = Koefisien regresi.

Tahap ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata – rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{sistem_i})^{w_{2i}}$$

Keterangan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan.

Tahap perhitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata – rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{bangunan_i})^{\frac{1}{n}}$$

Keterangan :

n = Jumlah bangunan dalam suatu proyek.

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti pusat distribusi barang, harga relatif stabil, variasi harga berada di sekitar harga nasional dan lain sebagainya.

C_i = dummy kota acuan = 0

Tahap kelima adalah menghitung IKK Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_i} \times 100$$

Keterangan

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota.

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Hubungan Antara Investasi per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Todaro (2016) investasi atau penanaman modal masuk sebagai salah satu komponen penyusun PDB maupun PDRB yang digunakan masing – masing negara maupun daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga tercapai pembangunan nasional yang diinginkan. Hubungan antara investasi per kapita dengan pembangunan manusia yaitu semakin tinggi investasi per kapita

(PMDN) maka indeks pembangunan manusia akan semakin baik. Pentingnya peranan investasi terhadap pembangunan manusia tampak pada perhatian berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang memberikan modal mereka untuk meningkatkan kualitas modal manusia tersebut. investasi yang dialokasikan untuk kepentingan modal manusia tidak dapat dilihat dalam jangka waktu yang singkat, sehingga tidak heran bahwa di dalam anggaran pemerintah seringkali terjadi tarik menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi dan investasi untuk sektor pembangunan modal manusia.

2.6.2 Hubungan Antara Produk Domestik Regional Bruto per kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Thamrin dalam Brata (2004) PDRB biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. hal ini berarti semakin tinggi PDRB per kapita maka semakin sejahtera masyarakat dengan adanya pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat untuk tercapainya pembangunan manusia karena dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi maka terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja dan otomatis pembangunan manusia meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan pembangunan manusia yang maksimal.

2.6.3 Hubungan Antara Indeks Kemahalan Konstruksi per kapita Dan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Hakim (2017) indeks kemahalan konstruksi digunakan untuk mengukur letak geografis wilayah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut yang membuat pembangunan manusia terhambat. IKK yang tinggi juga menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur suatu daerah, sehingga hubungan antara indeks kemahalan konstruksi per kapita dengan indeks pembangunan manusia yaitu semakin rendah nilai indeks kemahalan konstruksi per kapita maka semakin tinggi indeks pembangunan manusia yang artinya semakin meningkat infrastruktur atau aksesibilitas semakin membaik maka akan meningkatkan pembangunan manusia.

2.7 Studi Terkait

Studi terkait ini memuat berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam bentuk artikel jurnal ilmiah maupun skripsi, mengenai indeks pembangunan manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Priyagus *et al* (2019) yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Tujuan dari penelitian ini ingin melihat faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi IPM berdasarkan variabel PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta dan Tingkat Pengangguran Terbuka. alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa: (1) PDRB Sektor Pertanian, Belanja Langsung Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tingkat Pengangguran

Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat; (2) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (3) Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (4) Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (5) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat; (6) PDRB Sektor Pertanian berpengaruh dominan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hikmah J & Idris (2019) membahas tentang “Pengaruh Kemahalan Konstruksi, Kemandirian Fiskal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan asosiatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *fixed effect model*, variabel dependen pada penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia dan variabel independen terdiri dari kemahalan konstruksi, kemandirian fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa (1) kemahalan konstruksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Sumatera Barat. (2) Kemandirian fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Sumatera Barat. (3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Sumatera Barat.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iskandar Muda *et al* (2014) membahas tentang “Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel indeks biaya konstruksi, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara parsial indeks biaya konstruksi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Sedangkan variabel Pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Palayukan (2019) yang membahas tentang “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan pendekatan *fixed effect model*. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, maka perlu peningkatan alokasi belanja untuk sektor publik yakni belanja pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia dapat lebih baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suhyanto *et al* (2020) dengan judul “Pengaruh Dana Transfer Dana Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat”. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa IPM merupakan sekelompok anggota masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan berupa pendidikan, standar hidup layak, dan kesehatan. Peneliti juga menjelaskan bahwa skor IPM Jawa Barat secara umum selalu memperlihatkan tren naik dari tahun ke tahun, tetapi skornya selalu di bawah dari rata-rata nasional. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah berupa dana transfer (DAU, DBH dan DAK), Dana Desa dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM, dan menganalisis pendapatan daerah yang pengaruh totalnya paling tinggi terhadap IPM. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan model *fixed effect*. Berdasarkan hasil analisis sudah diketahui bahwa semua dana transfer berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga dengan pendapatan asli daerah dan dana desa. Pendapatan daerah yang pengaruh totalnya paling besar terhadap IPM secara berurutan adalah DAU, PAD, dan DAK. Pemerintah daerah harus membelanjakan dana transfer, PAD dan Dana Desa untuk kegiatan produktif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Handayani (2021) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik swasta maupun pemerintah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model*. Berdasarkan penelitian diatas didapatkan hasil bahwa secara simultan menyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan secara parsial variabel penanaman modal dalam negeri dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Utama (2019) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. Peneliti menjelaskan bahwa Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *fixed effect model*. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh langsung positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Modal Terhadap IPM di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011 – 2019”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengangguran dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

